

WANITA DALAM STRATEGI PERANG: TINJAUAN EMANSIPASI DAN PERLINDUNGAN WANITA

WOMEN IN WAR STRATEGY: REVIEW OF EMANCIPATION AND WOMEN PROTECTION

Erlinda Matondang¹

Freelance Writer
(erlinda.matondang@gmail.com)

Abstrak – Baik dalam konflik dan perang maupun upaya perdamaian, wanita dianggap sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia dan kelompok rentan. Dalam beberapa dekade terakhir, perlindungan terhadap hak wanita dan pemberdayaan wanita digaungkan dengan nama emansipasi. Hal ini menyebabkan kehadiran wanita dalam beberapa sektor penting, termasuk politik dan militer, sehingga wanita mempunyai peranan baru sebagai sumber daya dalam strategi perang. Dampaknya, kebijakan perlindungan wanita dalam perang dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan posisi mereka sebagai kombatan. Analisis isu ini seharusnya menggunakan dua konsep (perlindungan wanita dan strategi perang) untuk memahami cara pandang militer terhadap posisi wanita dan satu teori (feminisme) untuk memahami cara pandang wanita terhadap peranannya dalam militer saat perang berlangsung. Dengan demikian, objek observasi ini adalah peranan wanita dalam strategi perang dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hak wanita dan isu emansipasi. Dengan kata lain, ruang lingkup observasi ini adalah hak wanita dan strategi perang. Dalam observasi ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kajian literatur. Melalui observasi ini, kita dapat mempunyai pemahaman yang lebih luas tentang peranan wanita dalam strategi perang karena tujuan utamanya adalah melihat kemungkinan perubahan kebijakan terhadap perlindungan wanita dalam perang seiring dengan situasi terkini.

Kata Kunci : emansipasi, hak asasi manusia, strategi perang, perlindungan perempuan

Abstract – *Either in conflict and war or the peace, women are considered as the victims of human rights violation and the vulnerable people. In recent decades, the protection of women rights and women empowerment were sounded in the name of emancipation. It causes the presence of women in some important sectors, including politics and military, so women have a new role as means in war strategy. As the impact, the policy of protection of women in the war is questionable for their position as combatants. Analyzing this issue should use two concepts (women protection and war-strategy) to understand how military looks at women position and one theory (feminism) to understand how the women see their role in the military when the war happened. Thereby, the object of this observation is the role of women in war strategy related to the promoting of protection of women rights and emancipation issue. In other words, the study area should be in women rights and war strategy. In this observation, the data used is secondary data collected by using literature study methods. By this observation, we could have a wider understanding of the role of women in war strategy since the primary aim is to look forward on the amendment of the policy of women protection in the war along with the current situation.*

Keywords: *emancipation, human rights, war strategy, women protection*

¹ Penulis merupakan lulusan Universitas Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan Tahun 2015 dengan lebih dari dua tahun pengalaman bekerja di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penulis pernah meraih Juara II Penghargaan Ali Atlas 2016 dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pendahuluan

Dalam peperangan dan konflik bersenjata, masyarakat sipil selalu menghadapi rasa takut dan tidak aman atas rusaknya mata pencaharian, adanya tindakan pengusiran, kehilangan keluarga, dan kematian. Hal yang lebih buruk dialami oleh sebagian besar wanita pada masa Perang Dunia II. Mereka harus menghadapi tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hal ini yang mendorong penetapan sejumlah kebijakan perlindungan terhadap wanita oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB).

Perspektif wanita sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan selama perang atau konflik bersenjata masih mendominasi hingga saat ini. Rencana kerja *International Committee and the Red Cross (ICRC)*², sebuah organisasi yang aktif mendorong perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, menunjukkan bahwa pada tahun 2003, kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada upaya identifikasi dan pertimbangan perlindungan khusus dan umum, bantuan kesehatan dan kebutuhan untuk wanita yang terdampak perang, termasuk program bantuan untuk makanan, air, sanitasi, dan reunifikasi dengan keluarga yang dinyatakan hilang. Dengan kata lain, salah satu fokus kinerja ICRC adalah perlindungan wanita terdampak perang yang dinyatakan sebagai korban, bukan pelaku perang atau kombatan.

Seiring dengan perkembangan zaman, wanita mendapatkan peranan

² International Committee and the Red Cross, "Women and War: Special Report", 2003, hlm. 11.

yang lebih intensif dalam mendorong upaya penanganan konflik bersenjata dan memelihara perdamaian pasca-perang. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Austrian Development Cooperation*³, setidaknya ada tiga peranan wanita dalam penanganan konflik dan pemeliharaan perdamaian. *Pertama*, wanita bertanggung jawab untuk menjaga kebersamaan keluarganya selama perang berlangsung. Di dalam budaya masyarakat yang patriarkhi, wanita yang mengambil peranan sebagai kepala keluarga selama perang mengalami banyak kesulitan. *Kedua*, wanita yang berpartisipasi dalam organisasi pemeliharaan perdamaian mempunyai peranan yang signifikan sebagai negosiator dan mediator serta mendorong adanya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Peranan ini yang disoroti oleh Magda Lorena Cardenas dalam artikelnya, "Women-to-women Diplomacy in Georgia: A Peacebuilding Strategy in Frozen Conflict." Dalam artikel ini diulas pentingnya peranan wanita dalam melaksanakan strategi pembentukan perdamaian melalui hubungan personal antara sesama wanita, khususnya dalam penyelesaian konflik di Georgia. Pelibatan wanita dianggap dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengikuti proses resolusi konflik secara damai. Dengan kata lain, wanita dapat membangun perdamaian dengan memanfaatkan kemampuannya untuk menjalin hubungan (*people-to-*

³ Austrian Development Cooperation, "Focus: Women, Gender and Armed Forces", (Vienna: Austrian Development Cooperation, Oktober 2009), hlm. 2-3.

people contact) dengan wanita di wilayah konflik.⁴ Ketiga, wanita dengan kesadaran akan haknya dapat memperjuangkan hak untuk dirinya dan wanita lain. Hal ini membutuhkan pembangunan kesadaran yang dilakukan melalui pelatihan dan tindakan-tindakan terencana lainnya.

Pemberian peranan ini kepada wanita tidak terlepas dari merebaknya isu kesetaraan gender yang mendorong tuntutan emansipasi dan pemberdayaan wanita. Sehubungan dengan itu pula, wanita mendapatkan peranan baru dalam perang, yaitu sebagai pelaku perang (kombatant), baik yang tergabung sebagai anggota militer dari suatu negara maupun yang bergabung dengan organisasi paramiliter, pemberontakan, dan teroris. Peranan ini menimbulkan perdebatan yang mempertanyakan kesesuaian wanita terhadap peranan dan kebiasaan militer.⁵ Berbeda dengan peranannya dalam pembangunan perdamaian, wanita sebagai kombatant dilatih untuk menerapkan prinsip dengan maskulinitas kemiliteran. Jika partisipasi wanita dalam resolusi konflik mengandalkan psikologis femininitasnya, hal yang berbeda dengan posisinya sebagai kombatant. Artikel ini mengulas peranan wanita sebagai kombatant tersebut dalam konsep emansipasi dan perlindungan wanita. Dengan kata lain, artikel ini menyoroti

⁴ Magda Lorena Cardenas, Cardenas, "Women-to-women Diplomacy in Georgia: Peacebuilding Strategy in Frozen Conflict", *Civil Wars*, Vol. 21, No. 3, 2019, hlm. 385—409.

⁵ Joyce P. Kaufmann dan Kristen P. Williams, *Women at War, Women Building Peace: Challenging Gender Norms*, (Boulder: Kumarian Press, 2013), hlm. 1.

peranan yang berbeda dengan yang disoroti oleh Cardenas.

Namun, artikel ini juga tidak berfokus pada isu khusus seperti pemberantasan terorisme, seperti yang dituliskan oleh Katie M. Martinez dalam tesisnya yang membahas tentang potensi pelibatan tentara wanita Amerika Serikat dalam pemberantasan Boko Haram. Setidaknya ada dua pertanyaan besar yang menjadi dasar dari penulisan artikel ini, yaitu bagaimana peranan wanita sebagai kombatant dalam strategi perang dan bagaimana peranan tersebut jika ditinjau dari konsep emansipasi dan perlindungan wanita. Dengan kata lain, artikel ini membahas tinjauan konsep emansipasi dan perlindungan wanita terhadap keterlibatan wanita sebagai kombatant dalam strategi perang.

Ruang Lingkup Penelitian

Pengamatan ini melibatkan tiga variabel, yaitu emansipasi wanita, strategi perang, dan perlindungan terhadap wanita dalam situasi perang. Hingga saat ini sebagian besar kajian memandang wanita sebagai kelompok yang harus dilindungi hak asasinya di dalam perang. Namun, dalam perkembangannya, wanita mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dunia militer. Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada peranan wanita didalam perang yang ditinjau dari sisi emansipasi wanita dan perlindungan wanita dalam situasi perang.

Metode Penelitian

Keterlibatan wanita dalam perang dan konflik tidak dapat dinilai secara kuantitatif. Ada berbagai faktor yang tidak dapat dinilai secara kuantitatif, seperti kemampuan psikologis dan fisik wanita. Oleh karena itu, pengamatan ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif.

Pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka atau kajian literatur.

Hasil dan Pembahasan

Teori Feminisme dan Karakter Psikologis Wanita

Feminisme berkembang dalam hubungan internasional sebagai teori baru yang berisikan kritik terhadap teori-teori lama dan dasar, seperti liberalisme dan realisme. Feminisme diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) feminisme empiris (*empirical feminism*) yang berfokus pada isu gender sebagai dimensi empiris dari hubungan internasional; (2) feminisme analitis (*analytical feminism*), yang menggunakan gender sebagai sebuah teori yang mengungkapkan bias gender dalam konsep-konsep hubungan internasional dan menjelaskan aspek konstitutif dari hubungan internasional; dan (3) feminisme normatif (*normative feminism*), yang merefleksikan proses pembentukan teori sebagai bagian dari agenda normatif dari perubahan sosial dan politik.⁶

⁶ Jacqui True, "Feminism", dalam Scott Burchill, et

Feminisme empiris mengungkapkan bahwa sebagian besar alokasi bantuan pengembangan disediakan untuk wanita dalam bentuk teknologi pertanian, sistem pendanaan kredit, pendidikan, dan dukungan kesehatan.⁷ Di sektor ekonomi, feminisme empiris mengungkapkan bahwa dalam globalisasi wanita dan anak perempuan dijadikan objek perdagangan manusia transnasional dan dihargai dengan upah kerja yang rendah di negara berkembang. Disisi lain, feminisme empiris mengungkapkan bahwa wanita tidak hanya menjadi korban perubahan struktur global, tetapi juga memberdayakannya. Perubahan global membawa perubahan subjektivitas dan transformasi dalam hubungan gender di tingkat lokal hingga pedesaan.⁸

Sementara itu, dalam politik luar negeri, feminis mengungkapkan bahwa pembuatan kebijakan didominasi dengan maskulinitas yang dianut oleh aktor rasional dengan bertumpu pada konsep abstrak yang disebut "kepentingan nasional".⁹ Bahkan, dalam militerisasi atau peperangan, ketidaksetaraan gender juga semakin membesar. Peneliti feminis empiris mengungkapkan peranan wanita dalam militerisasi yang menyediakan layanan pendukung kegiatan militer, baik dalam bentuk psikologis, kesehatan, maupun seksual, merupakan bentuk kebijakan negara yang mencederai

al. (Ed.), *Theories of International Relations Third Edition*, (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 214.

⁷ *Ibid*, hlm. 217.

⁸ *Ibid*, hlm. 218.

⁹ *Ibid*, hlm 219.

wanita.¹⁰

Kalangan feminis empiris terus berfokus pada kondisi wanita yang berada di tingkat lokal dan domestik, termasuk yang tergabung dalam jaringan pekerja seks, pekerja rumah, ibu rumah tangga dan aktivis sipil dalam setiap kampanyenya. Selain itu, sorotan feminis empiris juga tertuju pada bentuk baru dari kegiatan solidaritas dan identitas lintas batas yang menunjukkan bahwa pada beberapa tahun terakhir, wanita memainkan peranan penting dalam gerakan melarang penambangan, kampanye anti-senjata nuklir (*Campaign for Nuclear Disarmament*), serta gerakan perlindungan wanita.¹¹

Pemikiran kaum feminis empiris didukung dengan pemikiran feminis analitis yang mengacu pada perbedaan konstruksi sosial asimetris gender dengan jenis kelamin (secara biologis). Pembahasan gender kerap kali disamakan dengan identitas biologis manusia dan bukan subjek dari konstitusi sosial. Menurut feminis analitis, konsep utama dalam Hubungan Internasional tidak terbentuk secara natural dan netral. Konsep-konsep tersebut, seperti kekuatan, kedaulatan, otonomi, anarkhi, keamanan, dan level analisis, dibentuk oleh hegemoni maskulin yang muncul dari pengalaman dan pengetahuan pria, sehingga Hubungan Internasional menjadi bidang yang didominasi dan eksklusif untuk pria.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 220.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 221—222.

Feminis analitis menyampaikan bahwa level analisis dari Hubungan Internasional tidak dapat dilakukan melalui abstraksi universal. Analisis membutuhkan kontekstualisasi sejarah dan budaya untuk merefleksikan kompleksitas dan ketidakpastian dalam struktur sosial. Selain itu, feminis analitis juga mengkritisi bias dalam konsep kekuatan (*power*) dan keamanan. Menurut feminis analitis, kekuatan individual berada didalam otonomi masing-masing. Kekuatan tidak dapat dibagi atau meningkat melalui hubungan kerja sama dalam konteks saling ketergantungan atau kepentingan bersama.¹³ Sementara itu, berkaitan dengan keamanan, khususnya tentang peristiwa 9/11 dan dampaknya, feminis analitis meyakini bahwa gender dan perbedaan jenis kelamin merupakan alasan di balik serangan teroris melawan negara-negara Barat.¹⁴ Sementara itu, feminis normatif menjelaskan bahwa hak wanita untuk berbicara dan bertindak menjadi permasalahan karena, secara sosial dan historis wanita, diberikan identitas yang berbeda dengan pria. Menurut feminis normatif, jika diberikan kesempatan, pengalaman wanita dapat mendukung teori kritis dan universal di bidang hubungan internasional.¹⁵

Terlepas dari teori yang disampaikan oleh ketiga golongan feminis tersebut, perbedaan gender menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam peperangan dan konflik bersenjata. Pernyataan feminis analitis yang menyatakan bahwa

¹³ *Ibid*, hlm. 225.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 227.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 231.

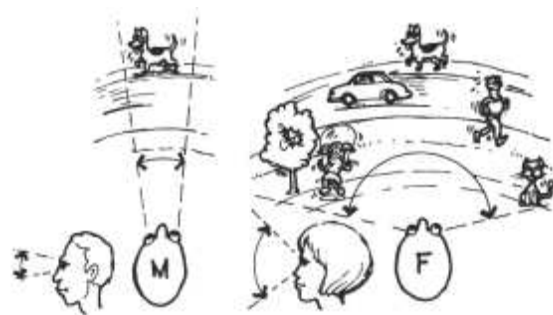
isu keamanan, termasuk didalamnya peperangan, tidak bersifat netral dalam isu gender. Namun, netralitas gender dapat digunakan dalam proses penyelesaian konflik bersenjata.¹⁶

Sebagaimana yang disampaikan dalam teori feminis, isu gender tidak sama dengan perbedaan jenis kelamin dalam arti biologis. Pembahasan mengenai kesetaraan gender merupakan isu politik dan moral, sedangkan perbedaan wanita dan pria dalam sisi psikologis dan kemampuan merupakan hal yang bersifat ilmiah.¹⁷ Wanita dan pria mempunyai perbedaan kemampuan fisik dan psikologis yang mendasar dan memberikan pengaruh pada karakternya. Perbedaan ini terbentuk sejak dilahirkan dan terus berkembang sesuai dengan kondisi sistem tubuh, lingkungan, dan kebiasaan.

Pada dasarnya, wanita mempunyai kemampuan intuisi yang baik dan fokus pada detail, termasuk perubahan sikap seseorang.¹⁸ Hal ini yang menyebabkan wanita selalu mampu menemukan hal-hal kecil yang kerap kali tidak terlihat oleh pria. Perbedaan ini dapat dilihat pada saat membedakan jenis warna. Pria biasanya menggunakan warna dasar untuk mendeskripsikan sesuatu, seperti merah, biru, dan hijau, sedangkan wanita dapat membedakan warna dengan jenis yang

lebih detail, seperti putih tulang (*bone*), hijau apel (*apple green*), lembayung muda (*mauve*), dan biru laut (*aqua*). Perbedaan ini disebabkan karena wanita mempunyai dua kromosom X.¹⁹

Kelebihan wanita juga terletak pada matanya yang mempunyai jangkauan pandangan lebih luas daripada pria.²⁰ Bahkan, jangkauan pandangan wanita bisa sampai 180° dan mengetahui setiap detail di dalamnya. Perbedaan jangkauan pandangan wanita dan pria dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Jangkauan Pandangan Mata Wanita dan Pria

Sumber: Why Men Don't Listen & Women Can't Read Maps, (Queensland: Pease International Pty, Ltd., 2001), hlm. 38

Tidak hanya mata, indera pendengaran wanita juga cenderung lebih sensitif terhadap suara yang sangat halus jika dibandingkan dengan pria. Bahkan, wanita dapat mengidentifikasi emosi seseorang melalui suaranya. Namun, wanita mempunyai kelemahan dalam kemampuan spasial.²¹ Wanita tidak dapat menentukan jarak dan arah. Oleh karena itu, pada beberapa kondisi, wanita kerap kali mendengarkan suara,

¹⁶ Cassandra K. Shepherd, "The Role of Women in International Conflict Resolution", *Journal of Public Law & Policy*, Volume 36, No. 2, Artikel 1, 2015, hlm. 57.

¹⁷ Alan dan Barbara Pease, *Why Men Don't Listen & Women Can't Read Maps*, (Queensland: Pease International Pty, Ltd., 2001), hlm. 24.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37.

²⁰ *Ibid*, hlm. 38.

²¹ *Ibid*, hlm. 36.

tetapi tidak mengetahui arah datangnya suara. Kelemahan ini dapat diminimalisasi melalui sejumlah latihan. Jika wanita mempunyai kemampuan spasial yang baik, performa kinerja wanita lebih baik dibandingkan pria.²²

Dalam hal profesionalitas, wanita mempunyai karakter kerja yang berbeda dengan pria. Wanita selalu terfokus pada hubungan dan kerja sama, sedangkan pria pada kekuatan (power) dan status.²³ Jika wanita menghadapi masalah dalam hubungannya, dia tidak dapat berfokus pada pekerjaannya, sedangkan pria yang menghadapi masalah dengan pekerjaannya tidak dapat berfokus pada hubungannya.²⁴ Karakter ini yang memunculkan nilai-nilai feminin, seperti saling ketergantungan, kolaborasi, dan kerja sama tim. Nilai-nilai ini yang sangat dibutuhkan dalam kemampuan strategis suatu organisasi.²⁵

Nilai-nilai ini pula yang menjadi alasan keberhasilan pelibatan wanita dalam penanganan terorisme di Afghanistan dan Irak. Amerika Serikat mengirimkan pasukan wanita ke Irak dan Afghanistan untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan komunitas setempat, sehingga seluruh pasukannya dapat mengatasi permasalahan norma budaya. Pelibatan pasukan wanita ini juga ditujukan untuk membangun pengumpulan informasi dan data intelijen.²⁶

²² *Ibid*, hlm. 143.

²³ *Ibid*, hlm. 152.

²⁴ *Ibid*, hlm. 158.

²⁵ *Ibid*, hlm. 284.

²⁶ Katie M. Martinez, *Women's Work: Incorporating Females into the United States Military Strategy to Contain and Degrade Boko Haram*, (Kansas: Fort

Wanita dapat bekerja baik di lingkungan yang menjunjung nilai-nilai feminin maupun yang menggunakan hirarki pria. Jika wanita bekerja di lingkungan dengan hirarki pria, termasuk menjadi tentara, dia selalu mempunyai dua pilihan, yaitu keluar atau menjadi maskulin.²⁷ Wanita yang memilih untuk menjadi maskulin dapat melakukan performa kerja yang setara atau bahkan lebih dari pria.

Perlindungan Wanita dalam Perang

Wanita dianggap sebagai 'kaum lemah' dan membutuhkan perlindungan, khususnya dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Pemikiran ini muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II yang menyisakan catatan bahwa sekitar 200.000 wanita dan anak perempuan diculik dan dipaksa untuk menjadi budak seks oleh tentara Jepang. Tindakan ini tidak hanya terjadi pada Perang Dunia II, tetapi juga pada konflik bersenjata dan perang yang terjadi pada beberapa dekade terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 1990, 5000 wanita Kuwait diperkosa oleh tentara Irak selama invasi Kuwait berlangsung. Sementara itu, pemerintah Rwanda melaporkan 15.700 kasus pemerkosaan (2000-5000 kasus berujung pada kehamilan) yang terjadi selama genosida Rwanda, sedangkan menurut UN Special Rapporteur, total seluruh kasus, termasuk yang tidak tercatat dalam laporan, sebanyak 250.000-500.000 kasus. Kondisi serupa

Leavenworth. 2017), hlm. 34—35.

²⁷ *Ibid*, hlm. 283.

juga terjadi di Republik Demokratik Kongo, sekitar 100.000 wanita menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 1998—2003. Laporan kekerasan seksual yang dialami wanita selama konflik bersenjata juga muncul di Liberia, Timor-Leste, Indonesia, Yugoslavia (sekarang pecah menjadi beberapa negara), Sudan dan Afghanistan.²⁸

Berakhirnya Perang Dunia II melahirkan perlindungan sipil dalam Konvensi Jenewa IV pada tahun 1949 yang di dalamnya terdapat pernyataan yang berbunyi “women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.” Selain itu, PBB juga menetapkan *Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict* pada tahun 1974.²⁹ Eksistensi dari deklarasi ini beserta sejumlah jaminan dunia terhadap perlindungan wanita tidak terlihat dalam situasi perang, seperti yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan negara-negara lainnya.

Baik hasil dari Konvensi Jenewa maupun deklarasi tersebut tidak hanya menjamin perlindungan dalam situasi perang, tetapi juga memberikan sejumlah hak kesetaraan gender. Hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya

emansipasi dan tingginya tuntutan wanita di seluruh dunia untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum pria. Atas nama emansipasi, wanita mendapatkan peran penting dalam politik, pembangunan pasca-perang, dan pemeliharaan perdamaian. Peranan ini pula yang pada akhirnya menunjukkan kapabilitas wanita dalam menangani konflik dan membangun perdamaian, baik secara formal maupun informal. Salah satu contoh implikasi peranan wanita dalam perpolitikan ditunjukkan melalui Gerakan Massa Wanita Liberia untuk Perdamaian (*the Women of Liberia Mass Action for Peace*). Gerakan ini terbentuk sebagai tanggapan terhadap Perang Sipil Liberia I dan II yang melibatkan anak-anak sebagai kombatan dan mendorong terjadinya kekerasan seksual kepada wanita. Melalui gerakan ini, wanita berharap dapat mendorong proses perdamaian di Liberia. Gerakan, yang dimulai dengan pertemuan dan doa bersama antara wanita Islam dan Nasrani di Monrovia, berkembang menjadi sebuah gerakan politis, yang mampu mendorong wanita untuk mendorong perdamaian di daerah dan mengawal pemilihan umum demokratis dan damai pada tahun 2005, sehingga seorang presiden wanita pertama di Afrika terpilih.³⁰

Keterlibatan wanita dalam proses informal seperti yang terjadi Liberia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan kelompok kecil hingga kegiatan berskala besar yang terorganisasi secara sistematis. Wanita sudah diadvokasi di luar proses formal

²⁸ Alain-Guy Tachou-Sipowo, “The Security Council on women in the war: between peacebuilding and humanitarian protection”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 92, No. 877, 2010, hlm. 205—206.

²⁹ Fitri Bintang Timur, “The Tales of the Three Asian Countries: How Indonesia, India, and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions”, *Global*, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 55—56.

³⁰ Cassandra K. Shepherd, *op.cit.*, hlm. 58—59.

untuk mencegah perang sebelum dimulai dan memperbaiki keadaan setelah perang berakhir. Advokasi seperti ini menjadi instrumen pembangunan hubungan dan pemahaman lintas budaya.³¹

Kontribusi wanita dalam perang ini juga tidak luput dari perhatian dunia. Alhasil, ada perubahan sikap yang mengarah pada pemberian hak yang sama terhadap wanita. Perubahan ini juga diafirmasi dalam Piagam PBB dengan potongan kalimat yang berbunyi “*in the equal rights of men and women.*”³² Dengan demikian, fondasi dasar implementasi kesetaraan gender yang disuarakan dalam emansipasi sudah terbentuk tidak hanya di tataran nasional atau regional, tetapi juga di tingkat internasional.

Melihat potensi dan efektivitas pelibatan wanita dalam penanganan situasi pasca-perang, khususnya dalam proses perdamaian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1325 pada 20 Oktober 2000. Bahkan, Mantan Sekretaris Umum PBB, Kofi Annan, menyatakan bahwa partisipasi wanita dalam pemeliharaan dan pembangunan perdamaian sangat dibutuhkan karena “*women know the price of peace well, and are therefore better equipped to prevent and resolve conflict.*”³³ Resolusi 1325 berisikan lima tujuan kunci, yaitu (1) meningkatkan partisipasi dan representasi wanita dalam setiap jenjang pembuatan keputusan; (2) memberikan perhatian pada kebutuhan khusus anak

perempuan dan wanita yang berada di dalam konflik; (3) menerapkan perspektif gender dalam proses pasca-perang atau konflik; (4) menerapkan perspektif gender dalam perencanaan, pelaporan, dan misi PBB; dan (5) menerapkan perspektif gender dan pelatihan dalam upaya mendukung operasi perdamaian PBB. Upaya pencapaian kelima tujuan tersebut disandarkan pada penerapan empat pilar, yaitu partisipasi (*participation*), pencegahan (*prevention*), perlindungan dan bantuan (*protection and relief*), serta perbaikan (*recovery*). Sementara itu, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan resolusi ini adalah Dewan Keamanan, negara anggota, dan entitas PBB, serta pihak yang berperang atau berkonflik.³⁴

Sayangnya, partisipasi dan representasi wanita masih sangat rendah, termasuk dalam negosiasi perdamaian. Walaupun ada sejumlah perangkat hukum formal yang mendukung, tidak ada perubahan yang berarti dalam peningkatan partisipasi wanita dalam penanganan konflik atau perang.³⁵ Tidak hanya dalam penanganan konflik atau perang, jumlah wanita yang berperan aktif dalam bidang pertahanan dan keamanan di tingkat nasional juga sangat terbatas. Salah satu faktor yang menjadi alasan situasi tersebut adalah adanya perspektif bahwa perang, militer, dan pertahanan merupakan bidang yang hanya dapat ditangani oleh pria. Sementara itu, wanita merupakan ‘kaum lemah’ yang harus

³¹ *Ibid*, hlm. 58.

³² Alain-Guy Tachou-Sipowo, *op.cit.*, hlm. 198.

³³ *Ibid*, hlm. 65.

³⁴ Security Council Resolution 1325, <https://www.peacewomen.org/SCR-1325>, diakses pada 10 Mei 2020.

³⁵ Cassandra K. Shepherd, *op.cit.*, hlm. 65.

dilindungi.³⁶ Walaupun demikian, sebagian besar wanita yang dianggap ‘kaum lemah’ sudah mengambil peranan sebagai kombatan dalam konflik atau perang, baik itu melalui institusi militer negara maupun organisasi pemberontak atau aktor lainnya. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada payung hukum yang spesifik membahas perlindungan atau penindakan terhadap kombatan wanita. Dengan kata lain, wanita sebagai kombatan masih belum mendapat perhatian khusus dari dunia internasional.

Wanita dalam Strategi Perang

Pembahasan strategi selalu melingkupi tiga hal, yaitu sumber daya (*means*), cara (*ways*), dan tujuan (*ends*). Begitupula dalam pembahasan strategi perang. Salah satu strategi perang yang seringkali menjadi referensi dalam studi pertahanan dan keamanan adalah strategi perang Sun Tzu atau “The Art of War.”

Dalam strategi perang Sun Tzu ada lima faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kondisi di lapangan, yaitu (1) hukum moral (*moral law*) yang membuat setiap prajurit mengikuti pimpinannya dan tidak takut pada setiap bahaya; (2) *heaven* mengacu pada kondisi siang dan malam, panas dan dingin, serta cuaca dan iklim; (3) *earth* mengacu pada jarak, bahaya atau keamanan, wilayah terbuka atau jalur sempit, dan kesempatan hidup atau mati; (4) komandan dengan karakter kebijaksanaan, kebajikan, keberanian, dan ketepatan; dan (5) metode dan

³⁶ Fitri Bintang Timur, *op.cit.*, hlm. 55—56.

kedisiplinan berkaitan dengan ketepatan pimpinan dan anggota di setiap divisi, pengelolaan logistik, hingga pengawasan anggaran militer. Pengetahuan tentang kelima faktor ini menjadi dasar untuk menentukan taktik yang digunakan dalam peperangan. Artinya kelima faktor ini merupakan bagian dari penyiapan *means* dan penentuan *ways*. Semakin detail informasi yang ada, baik tentang musuh maupun kapasitas pihak sendiri (termasuk sekutu), kemungkinan untuk memenangkan peperangan semakin besar.

Dalam strategi perang manapun, terutama strategi perang Sun Tzu, tidak pernah dinyatakan hal spesifik tentang kedudukan wanita dalam sebuah peperangan. Sebenarnya, peperangan tidak mempunyai gender. Dengan kata lain, baik pria maupun wanita dapat mengambil peranan sebagai pasukan atau kombatan di dalam perang. Namun, yang terjadi justru menunjukkan bahwa peranan wanita dalam perang selalu dinomorduakan dan ditujukan untuk mendukung kinerja pasukan yang umumnya adalah pria. Kepiawaian wanita dalam peperangan, khususnya sebagai kombatan, seperti yang ditunjukkan oleh Lyudmila Pavlichenko sebagai penembak jitu Uni Soviet selama Perang Dunia II, jarang disoroti dan ditemukan dalam berbagai literatur.

Wanita dan Militer

Lara Obravodovic menemukan fakta bahwa keterlibatan wanita dalam

kemiliteran lebih banyak terjadi di negara-negara komunis dibandingkan negara-negara liberal. Pada tahun 2009, sebesar 22% dari kemiliteran Korea Utara diisi oleh wanita yang bertugas aktif di lapangan, termasuk mengendalikan unit artileri. Sementara itu, hanya 5,4% dari total *Self-Defence Forces* (SDF) Jepang dan 4% dari total angkatan bersenjata Korea Selatan yang merupakan wanita.³⁷ Bahkan, pemerintah Korea Selatan lebih mengutamakan pria untuk menjadi anggota angkatan bersenjata dengan pertimbangan maskulinitas kehidupan kemiliteran.³⁸

Selain itu, Obravodovic juga menemukan fakta bahwa negara yang tingkat partisipasi wanita dalam kemiliteran tinggi justru mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pada tahun 2014, Cina dan Korea Utara yang mempunyai tingkat partisipasi wanita dalam kemiliteran tinggi mempunyai GDP per kapita sebesar USD 10.756 dan USD 1.800, sedangkan Jepang dan Korea Selatan hanya sebesar USD 34.883 dan USD 27.168. Namun, untuk tingkat pengangguran, keempat negara tersebut mempunyai persentase yang tidak jauh berbeda, yaitu Cina 4,7%, Jepang 4,1%, Korea Utara 4,6%, dan Korea Selatan 3,3%.³⁹

Keterlibatan wanita dalam kemiliteran diprediksikan akan meningkat karena ketersediaan tenaga kerja pria

³⁷ Lara Obravodovic, "Comparative Analysis of Women's Military Participation in East Asia", *Res Militaris, Ergomas*, No.1, September 2015, hlm. 1.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

dengan usia produktif. Apalagi jumlah tenaga kerja wanita di negara-negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja pria (Cina sebesar 64%, Korea Utara sebesar 72%, Korea Selatan 50% dan Jepang sebesar 49%). Dalam bidang partisipasi wanita di tataran profesional dan teknik lapangan, Cina menduduki peringkat satu dunia, sedangkan Jepang dan Korea Selatan menduduki peringkat 78 dan 98.⁴⁰

Saat ini Jepang sedang menggalakkan kesetaraan gender dalam rekrutmen personil militer. Berdasarkan keputusan Kementerian Pertahanan Jepang pada tahun 2008, wanita secara prinsipil diperbolehkan untuk menduduki berbagai posisi atau jabatan. Namun, seiring dengan hal tersebut, pemerintah Jepang juga membatasi peranan wanita dalam formasi, spesialisasi, dan bidang tertentu, seperti infanteri, teknisi, intelijen, helikopter anti-tank, unit perlindungan kimia, kapal selam, *guided-missile patrol-boats*, pilot pesawat pengintai dan tempur, unit pengawalan khusus, dan *armour*.⁴¹

Walaupun kesetaraan gender dalam kemiliteran sudah digaungkan, beberapa negara berkembang masih membatasi wanita untuk menduduki jabatan atau pangkat yang tinggi. Salah satu cara yang paling umum dilaksanakan adalah membatasi akses wanita untuk memasuki akademi pertahanan. Sebagai contoh, Pakistan mulai menerima kadet wanita pada tahun 2003, Serbia pada tahun 2007,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 4—5.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 12.

Colombia pada tahun 2009, India pada tahun 2010, Nigeria pada tahun 2011, dan Indonesia pada tahun 2013. Sementara itu, Thailand masih belum memberikan peluang kepada wanita untuk memasuki akademi militer hingga saat ini.⁴²

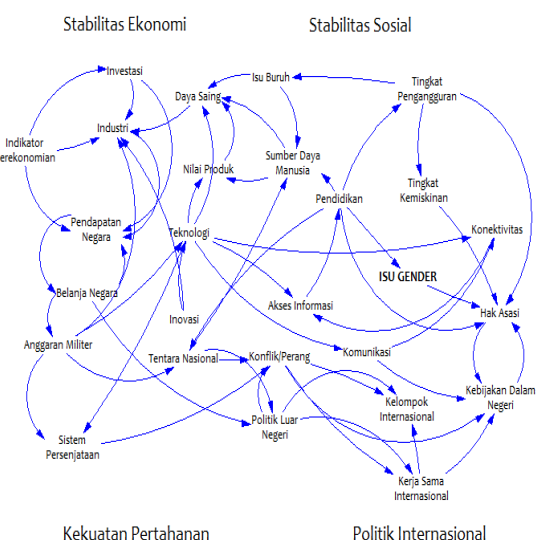
Jika pemerintah negara-negara Asia Timur dan sejumlah negara berkembang lainnya sedang mendorong kesetaraan gender di bidang kemiliteran sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia, Uganda menghadapi permasalahan yang berbeda. Dalam konflik yang terjadi di bagian utara Uganda, anak perempuan direkrut dan diculik untuk menjadi tentara anak. Jumlah mereka mencapai 20—30% dari total tentara anak yang terlibat dalam konflik di Uganda bagian utara. Menurut *Human Rights Watch*, seluruh anak yang dapat melarikan diri dari konflik tersebut mempunyai penyakit seksual yang dapat menular.⁴³

Dengan situasi saat ini, keterlibatan wanita dalam kemiliteran, konflik dan perang sudah tidak dapat diabaikan. Bukan hanya wanita dewasa, melainkan juga anak perempuan, mempunyai potensi keterlibatan sebagai kombatan yang sangat besar. Walaupun dengan segala keterbatasan, wanita masih diperhitungkan untuk menjadi salah satu kekuatan pertahanan.

Wanita dalam Strategi Perang: Tinjauan Emansipasi dan Perlindungan Wanita

Munculnya isu gender yang menghasilkan emansipasi tidak dapat dipisahkan dari perubahan situasi dan kondisi ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik internasional, serta sosial-budaya. Jika ditinjau pada Gambar 2, seluruh elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saling berkaitan satu sama lain, termasuk isu-isu yang berkembang baik di tataran nasional maupun internasional.

Isu gender merupakan satu elemen yang berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan politik internasional. Namun, dampak dari kemunculannya juga memengaruhi elemen dari kekuatan pertahanan dan stabilitas ekonomi. Hal ini merupakan dampak dari dependensi elemen-elemen ekonomi, sosial, pertahanan, dan politik internasional yang tidak dapat dihindari.



Gambar 2. Dependensi Elemen-elemen Ekonomi, Sosial, Pertahanan, dan Politik Internasional

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020

⁴² Fitri Bintang Timur, *op.cit.*, hlm. 56.

⁴³ Alain-Guy Tachou-Sipowo, *op.cit.*, hlm. 205—206.

Kemunculan teori feminisme dan perjuangan kaum feminis untuk mendapatkan pengakuan tidak hanya di negaranya, tetapi juga di tingkat internasional, menjadikan isu gender menjadi salah satu elemen yang sangat dipertimbangkan saat ini. Kesetaraan gender sudah digalakkan di berbagai bidang. Bahkan, hasilnya sudah dirasakan oleh sebagian besar wanita di seluruh dunia, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan; hak untuk menduduki jabatan penting, baik di instansi swasta maupun pemerintahan, termasuk di organisasi internasional; hak untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang setara dengan pria; hak berbicara dan menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Bahkan, wanita dapat menjadi presiden atau perdana menteri. Namun, mengapa kesetaraan gender tidak berhenti digaungkan oleh kaum feminis?

Wanita mendapatkan beberapa hak yang membantu perkembangannya secara sosial, budaya, dan ekonomi. Namun, ada pembatasan yang terjadi secara disadari atau tidak diterapkan tidak hanya di tingkat lokal atau dalam negeri saja, tetapi juga dunia internasional. Salah satu bentuk pembatasan itu adalah kuota. Setiap jabatan di suatu instansi menetapkan kuota keanggotaan wanita, termasuk dalam kursi parlemen. Seolah-olah salah satu indikator dari kesetaraan gender adalah jumlah atau angka yang menunjukkan partisipasi wanita setiap periodenya.

Apalagi kedua elemen yang berkaitan langsung dengan isu gender

terus mengalami perkembangan, yaitu pendidikan dan hak asasi. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita, semakin dia menyadari potensinya untuk mandiri. Pendidikan semakin berkembang dengan peningkatan kemampuan penguasaan teknologi yang menyebabkan besarnya akses terhadap informasi dan mendorong peningkatan konektivitas. Hal ini yang berdampak pada cepatnya penyebaran suatu paham atau pemikiran tertentu di kalangan masyarakat, termasuk pikiran tentang kesetaraan gender. Selama kaum feminis masih terus merasa hak-haknya belum terpenuhi, teknologi dan inovasinya akan memperkeras gaung feminisme.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan, selain data kuantitas wanita yang berpendidikan, wanita mempunyai pengetahuan yang sebanding dengan pria. Dengan kata lain, kemampuan berpikir dan tingkat pengetahuan wanita dan pria sudah setara. Namun, secara psikologis dan fisik, wanita dan pria berada dalam posisi yang berbeda dan saling melengkapi.

Wanita dapat mengambil peranan di bidang yang maskulin atau didominasi oleh pria, seperti kemiliteran dan politik luar negeri. Wanita yang bekerja di bidang tersebut mempunyai dua pilihan, yaitu menjadi maskulin atau meninggalkan pekerjaannya. Berubah menjadi maskulin selayaknya beradaptasi tidak berhubungan dengan penampilan fisik, tetapi kemampuan fisik dan psikologis. Sebagaimana Margareth Thatcher dengan

kebijakannya yang tidak menyiratkan psikologis seorang wanita atau Lyudmila Pavlichenko dengan kemampuannya menembak, wanita yang bergabung dalam kemiliteran juga dapat dilatih untuk mempunyai kemampuan pria, termasuk kemampuan spasial. Kemampuan hasil latihan ini tidak menggantikan, tetapi justru menjadi keterampilan baru yang mendukung kemampuan dasarnya sebagai wanita.

Dalam strategi perang Sun Tzu, ada lima elemen yang harus diperhatikan oleh seorang komandan perang. Dari kelima elemen tersebut, wanita mempunyai sensitivitas untuk mengidentifikasi *heaven* dan *earth*. Pandangan wanita yang menyeluruh, pendengaran dan penciuman yang tajam, serta fokus pada detail membuat wanita mempunyai kemampuan yang lebih baik dari pria dalam hal mendapatkan kejelasan *heaven* dan *earth*. Selain itu, dengan preferensi pada hubungan atau kerja sama, wanita sangat dibutuhkan untuk membangun *moral law* di dalam suatu pasukan.

Jika ditinjau pada tiga elemen strategi, yaitu *means*, *ways*, dan *ends*. Wanita berada di bagian *means* dan *ways*. Wanita juga merupakan sumber daya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dengan prinsip kesetaraan gender yang diajukannya, wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya.

Wanita juga berada dalam elemen *ways*. Dalam proses menuju *ends*, wanita yang bergabung dalam militer selalu

mempunyai dua pilihan, yaitu membentuk kerja sama atau melanjutkan peperangan. Pilihan pembentukan kerja sama tidak akan didapati dalam diri seorang pria karena yang menjadi fokus dari pria adalah *power*. Wanita juga dapat ditempatkan dalam pasukan tanpa pembatasan bidang, tetapi harus diikuti dengan pelatihan yang mumpuni.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya, keterlibatan wanita dalam perang menimbulkan dilema antara emansipasi dan perlindungan terhadap hak wanita dalam konflik dan peperangan. Inti dari perlindungan wanita di dalam perang atau konflik dilaksanakan untuk melindungi haknya serta mencegah adanya tindakan pelecehan dan kekerasan. Sebagai kombatan, kekerasan tidak dapat dihindari, tetapi perlindungan dari tindakan pelecehan dan pelanggaran hak lainnya masih tetap berlaku. Wanita yang berada dalam zona perang, sekalipun dia merupakan anggota militer, tetap berada dalam perlindungan. Wanita yang terlibat dalam konflik dan perang, tetap dilindungi haknya. Sementara itu, ikut berperang juga merupakan hak wanita yang diberikan atas nama emansipasi. Dengan kata lain, ada dua standar yang berbeda dalam menentukan peranan wanita dalam peperangan.

Hal ini tidak berlaku untuk anak perempuan. Ada dua hukum yang menjadi alasan tidak berlakunya dua standar dalam menentukan peranan wanita dalam peperangan, yaitu hukum yang mengatur

tentang pekerja di bawah umur dan perlindungan terhadap anak. Penegakan kedua hukum yang terus digaungkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF).

Menurut beberapa orang dan kelompok, kebijakan perlindungan terhadap wanita merupakan peluang untuk memenangkan peperangan atau konflik. Apalagi banyak pihak yang terlibat konflik atau perang menganggap bahwa penegak hukum di tingkat internasional tidak mempunyai andil yang besar dalam menerapkan kebijakan perlindungan wanita. Oleh karena itu, kombatan wanita terus bermunculan di zona konflik/perang, termasuk juga anak perempuan.

Suatu organisasi internasional dapat langsung menegur negara anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan wanita. Namun, tidak demikian dengan kelompok ekstrimis dan teroris yang menggunakan wanita dan anak perempuan sebagai pasukan dan martir.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, wanita mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang dapat digunakan sebagai sumber daya dalam peperangan dan konflik. Pemberdayaan wanita dalam peperangan dan konflik merupakan implementasi dari nilai-nilai emansipasi atau kesetaraan gender yang sudah digaungkan oleh kaum feminis sejak lama. Sementara itu, perlindungan wanita tidak membahas posisi wanita sebagai kombatan. Namun, jika ditinjau secara menyeluruh, wanita

sebagai kombatan atau pasukan dalam perang dapat dibenarkan atas dasar emansipasi, sedangkan perlindungan hak wanita tetap harus dijalankan dalam rangka mencegah tindakan pelecehan atau pelanggaran hak lainnya.

Wanita kerap kali digunakan sebagai martir atau senjata dalam strategi peperangan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa dalam strategi perang, wanita menempati dua posisi, yaitu *means* dan *ways*. Dengan posisi dan kemampuannya, wanita merupakan salah satu kunci yang dapat digunakan untuk memenangkan peperangan.

Rekomendasi

Salah satu rekomendasi dari artikel ini adalah pelaksanaan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui efektivitas keterlibatan wanita sebagai kombatan dalam perang dan konflik, tingkat kesadaran wanita terhadap peranannya dalam perang dan konflik, serta hal-hal lain yang masih berkaitan dengan tema yang diangkat dalam artikel ini. Selain itu, ada tiga rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh setiap negara dalam memperdayakan wanita dalam pasukan militernya. Adapun ketiga rekomendasi tersebut, antara lain (1) rekrutmen wanita dalam kemiliteran sangat membutuhkan pelatihan khusus untuk mengasah keahlian tertentu; (2) pasukan wanita mendapatkan pelatihan lapangan hingga membentuk kemampuan yang setara dengan pria; dan (3) perlu ada kebijakan khusus yang mengatur

tentang penanganan anak perempuan di zona konflik/perang untuk menghindari keterlibatannya sebagai kombatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Burchill, S., et al. (Ed.). 2005. *Theories of International Relations Third Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kaufman, J.P. dan Williams, K.P. 2013. *Women at War, Women Building Peace: Challenging Gender Norms*. Boulder: Kumarian Press
- Pease, A. & B. 2001. *Why Men Don't Listen & Women Can't Read Maps*. Queensland: Pease International Pty, Ltd.
- True, Jacqui. 2005. "Feminism". Dalam Scott Burchill, et al. (Ed.). *Theories of International Relations Third Edition*. New York: Palgrave Macmillan.

Jurnal

- Cardenas, M.L. 2019. "Women-to-women Diplomacy in Georgia: Peacebuilding Strategy in Frozen Conflict". *Civil Wars*, Vol. 21. No. 3.
- Obradovic, L. 2015. "Comparative Analysis of Women's Military Participation in East Asia". *Res Militaris, Ergomas*, No.1. September.
- Shepherd, C.K. 2015. The Role of Women in International Conflict Resolution. *Journal of Public Law & Policy*. Vol. 36. Isu 2. Artikel 1.
- Tachou-Sipowo, A. 2010. "The Security Council on women in the war: between peacebuilding and humanitarian protection". *International Review of the Red Cross*. Vol. 92/ No. 877.
- Timur, F.B. 2016. "The Tales of the Three Asian Countries: How Indonesia, India, and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions. *Global*. Vol. 18.No. 1.

Laporan

International Committee and the Red Cross. 2003. *Women and War: Special Report*. Maret.

Buletin

Austrian Development Cooperation. 2009. "Focus: Women, Gender and Armed Forces. Vienna: Austrian Development Cooperation". October.

Tesis

Martinez, K.M. 2017. *Women's Work: Incorporating Females into the United States Military Strategy to Contain and Degrade Boko Haram*. Kansas: Fort Leavenworth.

Website

Perserikatan Bangsa-bangsa, "Security Council Resolution 1325", <https://www.peacewomen.org/SCR-1325>, diakses pada 10 Mei 2020.